

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai perubahan syarat usia calon kepala daerah telah memicu polemik publik yang signifikan di Indonesia, terutama karena dugaan keterkaitannya dengan politik dinasti yang menguntungkan Kaesang Pangarep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana dua media online terbesar di Indonesia, Kompas.com dan Detik.com, membingkai (framing) isu kontroversial tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman, penelitian ini mengkaji lima berita dari setiap portal yang diterbitkan dalam rentang waktu 25 Mei hingga 25 Juni 2024. Analisis difokuskan pada empat elemen framing: *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan penyebab), *make moral judgement* (membuat penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua media membangun realitas sosial yang sangat berbeda. Kompas.com secara progresif mengkonstruksikan isu ini sebagai sebuah krisis demokrasi. Bingkainya berevolusi dari isu hukum-prosedural menjadi ancaman nyata dari politik dinasti dan nepotisme, secara eksplisit mengaitkan putusan MA sebagai manuver untuk memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep. Kompas.com menggunakan penilaian moral yang sangat negatif dan menawarkan solusi radikal berupa seruan agar KPU menolak putusan tersebut. Sebaliknya, Detik.com secara konsisten membingkai isu ini sebagai masalah hukum-prosedural yang telah selesai dan melakukan depolitisasi terhadap kontroversi. Masalah didefinisikan secara teknis sebagai koreksi yang sah oleh MA terhadap peraturan KPU yang keliru. Dimensi politik dinasti secara sistematis dikesampingkan, dan kritik yang muncul hanya dibingkai sebagai keluhan prosedural yang "merepotkan". Solusi yang ditawarkan bersifat pasif, yaitu mendorong publik untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan realitas hukum yang baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompas.com membangun narasi bahaya bagi demokrasi, sementara Detik.com membangun narasi normalisasi hukum. Perbedaan ini menyoroti peran kuat media dalam mengkonstruksi realitas politik dan mengarahkan persepsi publik terhadap isu yang sama.

Kata Kunci: Analisis Framing, Robert Entman, Syarat Usia Kepala Daerah, Kompas.com, Detik.com, Konstruksi Realitas Sosial, Politik Dinasti.